

Pemindahan ASN ke IKN - Sebagai bagian Transformasi Birokrasi

Priyanto Rohmattullah

Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

Disampaikan pada Seminar Online BIDIKTAMU
Puslat Pegawai ASN Kemendesa PDTT

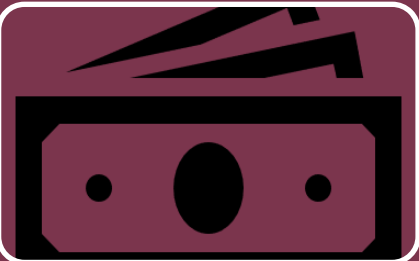
9 Agustus 2023



Outline



Skenario Pemindahan ASN ke IKN Tahun 2024
(Tahap I)



Hak dan Kewajiban bagi ASN yang Dipindahkan
ke IKN

Visi IKN

 Aman dan terjangkau

 Selaras dengan Alam

 Terhubung, Aktif & Mudah Diakses

 Sirkuler dan Tangguh

 Pembangunan IKN yang rendah emisi karbon

Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

Peluang ekonomi tangguh untuk semua 

Nyaman & efisien via teknologi & inovasi 

Keindahan Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika 

Kota Berkelanjutan di Dunia

Simbol Identitas Nasional

KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

ENABLER

Public Private Partnership (PPP)

Kolaborasi tri-kota

Sektor prioritas masa depan

Infrastruktur dan konektivitas pintar

Otorita IKN

Pemerintahan efektif dan efisien

Kota layak huni

ENABLER



8 Prinsip dan 24 KPI IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua



1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler & Tangguh	6. Aman & Terjangkau	7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
1.1 >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan) 1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit 1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)	2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru 2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit 2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif	3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif 3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik 3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN 4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung 4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha	5.1 >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan 5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045 5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045 6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah dan sederhana	7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index (EGDI)</i> oleh UN 7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis 7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat <i>Digital Services</i>	8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035 8.2 PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi 8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045

Redesain Transformasi Ekonomi – Instrumen SDGs

“Build Forward Better dengan TPB/SDGs sebagai instrumen utama dari setiap strategi”

Tujuh Strategi utama “game changer” menuju Visi Indonesia 2045



#1 - Strategi SDM Berdaya Saing dan Sejahtera

- Sistem Kesehatan
- Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
- Perlindungan Sosial
- Riset dan Inovasi



#2 - Strategi Produktivitas Sektor Ekonomi

- Industrialisasi
- Produktivitas UMKM
- Modernisasi Pertanian
- *Logistics*
- *Blue Economy*



#3 - Strategi Ekonomi Hijau

- Ekonomi Rendah Karbon
- Transisi Energi
- Sirkular Ekonomi



#4 - Strategi Transformasi Digital

- Sumber Daya Manusia
- Infrastruktur Digital
- Pengembangan Digital
- Pemanfaatan Digital



#5 - Strategi Integrasi Ekonomi Domestik (*Economic Powerhouse*)

- Infrastruktur konektivitas: Superhub: Laut, Udara
- Pengembangan Kawasan/ Koridor Ekonomi
- *Domestic Value Chain*



#6 - Strategi Pengembangan Kota Baru dan IKN

- Sumber pertumbuhan baru
- Menyeimbangkan ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah

#7 Strategi Enabling Environment:

Stabilitas Makroekonomi, Sistem Keuangan, Pasar Kompetitif, Demokrasi, Hukum, Reformasi Birokrasi, Hankam

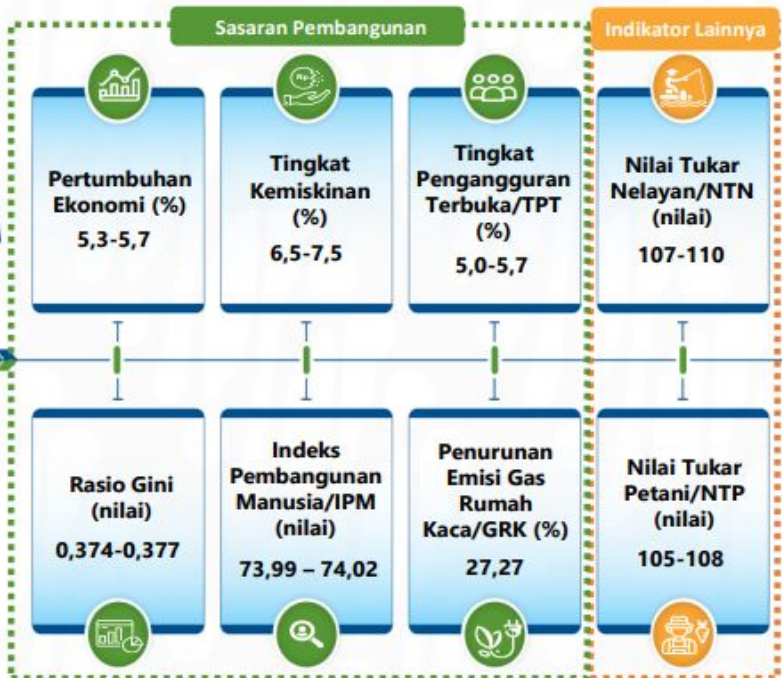
Arah Kebijakan RKP 2024

TEMA RKP 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

SASARAN PEMBANGUNAN RKP Tahun 2024

Keterangan:

Hasil exercise
Bappenas
Februari 2023



ARAH KEBIJAKAN RKP Tahun 2024



PRIORITAS NASIONAL



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Skenario Pemindahan ASN ke IKN Tahun 2024

Pemetaan Kompetensi ASN ke IKN

Asesmen ASN berdasarkan penataan talenta (talent mapping)

Pemetaan talenta dilakukan kepada ASN dengan memperhatikan:

1. Kompetensi Manajerial
2. Kompetensi Sosio Kultural
3. Kompetensi Teknis
4. Kinerja
5. Rekam Jejak
6. Prestasi, serta
7. Emerging Skill untuk Smart Governance

Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Rencana Penyediaan Perumahan (27 Juli 2023)

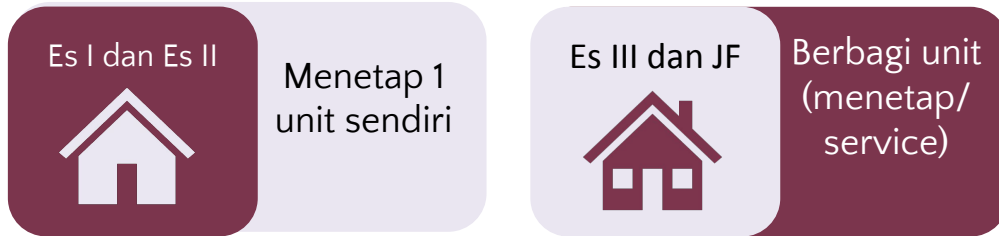


Skema I: APBN



47 Tower
(31 Tower ASN + 16 Tower Hankam)
1 Tower: 60 unit, luas unit: 98 m²

Selama Masa Transisi:



Setelah Masa Transisi: 47 tower tersebut akan digunakan seluruhnya oleh Pejabat Fungsional.

1860 Unit

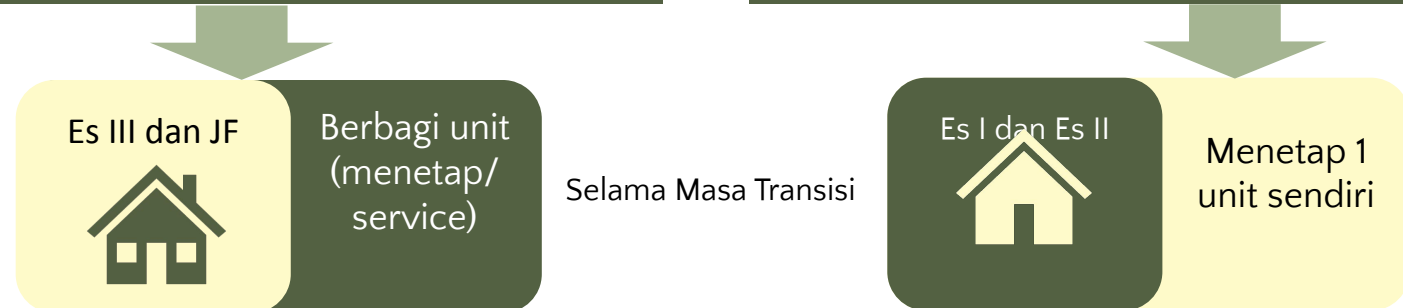
Skema II: APBN + KPBU

Pendanaan APBN

47 Tower
(31 Tower ASN + 16 Tower Hankam)
1 Tower: 60 unit, luas unit: 98 m²

Pendanaan KPBU

35 Tower
(23 Tower ASN + 12 Tower Hankam)
1 Tower: 30 unit, luas unit: 190 m²



Setelah Masa Transisi:

- 47 tower akan digunakan oleh Pejabat Fungsional
- 35 tower akan digunakan Es III

1860 Unit dengan luas 98 m²
+ 690 Unit dengan luas 190 m²

Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Skenario Pemindahan ASN #1



Perlu penyesuaian jumlah ASN yang pindah ke IKN sesuai dengan ketersediaan hunian pada tahun 2024.

Alternatif 1

38 K/L akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama.

Kementerian PANRB akan melakukan exercise jumlah ASN di 38 K/L sesuai dengan ketersediaan hunian

1. **Lembaga Tinggi Negara** (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK);
2. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves);
3. **Kementerian 'Triumvirat'** (Kemendagri, Kemenlu), *sebagai Plt. Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Ps. 8 (3) UUD 1945;*
4. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres);
5. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP);
6. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
7. **Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum** (BIN, BSSN, Kejaksaan, Kemenkumham, KPK);
8. **Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN** (KLHK);
9. **Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan** (Kemenkes);
10. **Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi** (Kemendag, KemenESDM).
11. **Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)** (BNPB, BMKG, Badan Pangan Nasional, Basarnas/BNPP, BPIP)

Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Skenario Pemindahan ASN #2



Diperlukan penyesuaian jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN dengan ketersediaan hunian ASN di IKN pada tahun 2024.

Alternatif 2

 16 K/L akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama.

 Kementerian PANRB akan melakukan exercise jumlah ASN di 16 K/L sesuai dengan ketersediaan hunian.

1. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves);
2. **Kementerian ‘*Triumvirat*’** (Kemendagri, Kemenlu), *sebagai Plt. Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Ps. 8 (3) UUD 1945)*;
3. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres);
4. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB);
5. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)



Hak dan Kewajiban bagi ASN yang Dipindahkan ke IKN

Skenario Pemindahan K/L ke IKN sesuai Lampiran UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara



KLASTER 1

1. **Presiden dan Wapres;**
2. **Lembaga Tinggi Negara** (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK);
3. **Kementerian Koordinator** (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves);
4. **Kementerian 'Triumvirat'** (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), *sebagai Plt. Kepresidenan apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Ps. 8 (3) UUD 1945;*
5. **K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung** (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres);
6. **K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan** (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP);
7. **Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN** (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
8. **Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum** (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejaksaan, Kemenkumham, KPK);
9. **Lembaga Negara Independen dan Badan Publik** (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan, BPJS

KLASTER 2

1. **Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN** (Kemenhub, KLHK, KemenBUMN);
2. **Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan** (Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDTT, KemenPPPA, Kemenpora).

KLASTER 3

Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop-UKM, Kemenaker, Kementan, KemenESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM).

KLASTER 5

Lembaga Non Struktural (LNS)
KPU, Bawaslu, DKPP, PPAK, ORI, KASN, BPIP, BNPP, KIP, KKIP, DPOD.

KLASTER 4

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)
BPS, BKN, LAN, BKKB, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, Wantannas, LKPP, BRIN, BPOM.

Kelembagaan yang belum diprioritaskan dipindahkan: ANRI, BSN, BMKG, Bapeten, Perpustakaan RI, KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, SKK MIGAS, BP Batam, BKPRN, BP2MI, Baznas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komite Profesi Akuntan Publik, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, Badan Pengawas Rumah Sakit, Lembaga Sensor Film, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keperawatan Indonesia, Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pemberian Benefit bagi ASN yang Dipindahkan ke IKN

Berdasarkan PerPres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Fasilitas Rumah Dinas

- Rumah Tapak: (i) Menteri/Kepala Lembaga (580 m²), (ii) Pejabat Negara (490 m²), dan (iii) JPT Madya (390 m²).
- Rumah Susun: (i) JPT Pratama (290 m²), (ii) Administrator/Koordinator (190 m²), dan (iii) JF (98 m²).

Biaya Pindah

- Biaya yang ditimbulkan dalam proses ASN ke IKN akan ditanggung oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku

Pengaturan Fasilitas yang Fleksibel

- Pengaturan pemberian fasilitas/benefit yang fleksibel, khususnya yang bersifat non-moneter, sesuai dengan kebutuhan tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Pemberian Tunjangan Kemahalan*

- ** Disepakati adanya pengaturan tentang pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN.*
- *Tantangan: hingga saat ini belum ada indeks kemahalan wilayah untuk IKN.*

Benefit I: Fasilitas Rumah Dinas



Berdasarkan Rapat Pembahasan Skenario Pemindahan ASN ke IKN pada tanggal 27 Juli 2023.

Dengan menggunakan skema pendanaan APBN, maka luas rumah susun bagi Eselon I, Eselon II, Eselon III dan JF yaitu sebesar **98 m²**.

DESAIN INTERIOR Rumah Susun ASN



LAYOUT UNIT D 98M2 Rumah Susun ASN dan Hankam



Es III dan JF: Berbagi unit (menetap/ service)

LAYOUT UNIT A 98M2 Rumah Susun ASN dan Hankam



Es I dan Es II: Menetap 1 unit sendiri

Benefit II: Biaya Pindah



- Seluruh komponen biaya pindah dianggarkan oleh masing-masing K/L yang akan dipindahkan ke IKN.
- Berdasarkan hasil identifikasi, baru 10 K/L yang telah mengalokasikan pada Renja 2024.

Benefit III: Pengaturan Fasilitas yang Fleksibel



1. Progres pembangunan IKN hingga 21 Juni 2023, antara lain bahwa pembangunan di Kawasan KIPP masih berfokus pada:
 - Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN;
 - Kantor Kementerian Koordinator;
 - Rumah Tapak Menteri.
2. Belum ada pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun rekreasi dan hiburan di KIPP IKN.

Diharapkan ASN yang dipindahkan ke IKN pada tahap pertama belum membawa keluarga dikarenakan masih minimnya fasilitas di Kawasan IKN.

Benefit IV: Pemberian Tunjangan Khusus

Berdasarkan Diskusi Pemindahan ASN ke IKN, 04 Agustus 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS Pasal 19:

“Apabila terdapat alasan-alasan yang kuat, PNS dapat diberikan tunjangan-tunjangan.”

- Pengaturan (legal aspect) mengenai tunjangan khusus, menjadi kewenangan Kementerian PANRB dan BKN.
- Sedang dilakukan exercise mengenai tunjangan khusus tersebut, termasuk opsi penamaan tunjangan, opsi besaran tunjangan, serta opsi skema dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Transformasi Birokrasi: Outstanding Issues



Transformasi Cara Kerja dan Penerapan SPBE di

Perubahan cara kerja di IKN melalui penerapan SPBE untuk mewujudkan *digital government* di IKN, yakni (i) **akselerasi proses bisnis SPBE terintegrasi**; (ii) **pemanfaatan infrastruktur TIK**; (iii) **pengembangan aplikasi umum**; dan (iv) **penerapan pelayanan publik digital** menuju penerapan pengaturan kerja **fleksibel** (*flexible working arrangement*)



Pengelolaan Fasilitas Kerja oleh OIKN

Perlu kejelasan terkait fasilitas kerja apa saja yang disediakan oleh OIKN. Hal ini akan berdampak pada struktur organisasi saat ini khususnya unit kerja dibawah sekretariat K/L.



Penataan Manajemen ASN

Penataan manajemen ASN untuk menjamin ASN yang dipindahkan ke IKN memiliki kapasitas dan kompetensi mumpuni, melalui (i) **pemutakhiran pemetaan kompetensi ASN** yang akan dipindahkan ke IKN; dan (ii) **pengembangan kompetensi ASN** terkait *smart governance*; dan (iii) **pemberian insentif moneter dan non-moneter**; dan (iv) **penerapan manajemen kinerja** menuju struktur organisasi yang ramping dan lincah



Pelibatan ASN Pemda Penyangga IKN

Pelibatan ASN Pemda sekitar IKN (Kaltim, PPU, Kukar, Balikpapan, Samarinda) melalui penajaman pengaturan (i) **opsi pelibatan** (di K/L, di Otorita IKN), (ii) **mekanisme pelibatan** (magang, mutasi, seleksi terbuka); (iii) **dukungan pemetaan kompetensi ASN Pemda penyangga IKN**; dan (iv) **pengembangan kompetensi ASN Pemda sekitar IKN**



Terima Kasih